BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri-sendiri dan akan saling membutuhkan manusia lainnya. Hakikat manusia menjadi mahluk sosial telah terbentuk sejak manusia dilahirkan. Dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, manusia tidak dapat menjalankan hidupnya seorang diri. Bahkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan manusia lain untuk memberikan bantuan dan pertolongan. Ketika manusia hidup berdampingan dan berada dalam suatu pemukiman atau lingkungan yang sama, mereka dapat disebut juga sebagai masyarakat.

Masyarakat dapat dinyatakan sebagai masyarakat yang sejahtera apabila kebutuhan hidupnya tercukupi baik itu kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sekunder seperti makanan yang bergizi, pakaian yang baik, pendidikan yang tinggi, dan lain sebagainya yang sifatnya menunjang kebutuhan primer. Kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder tersebut dapat tercukupi ketika masyarakat memiliki pendapatan yang cukup dan stabil.

Menurut Asmah Ahmad, kesejahteraan sosial adalah darjah atau sejauh mana keperluan dan kehendak sesuatu penduduk itu dipenuhi.[1] Apabila mereka merasakan apa yang diingini sudah dapat terpenuhi dan tercukupi, maka sudah cukup untuk masuk pada ketegori hidup yang sejahtera. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang memiliki stabilitas sosial dan ekonomi.

Mengetahui jika belum semua masyarakat sudah hidup dengan sejahtera khususnya pada bidang perekonomian memberikan sinyal kepada pemerintah untuk menolong dan membantu masyarakatnya. Namun, tentunya pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Begitu pula dengan apa yang terjadi di

[1] Ahmad, A. (2005). Kualiti hidup dan pengurusan persekitaran di Malaysia. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Persekitaran 2005. Program Pengurusan Persekitaran, Pusat Pengajian Siswazah UKM, 3-14.

Kelurahan Lubang Buaya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal peneliti dengan kader PKK, rata-rata tingkat perekonomian masyarakatnya adalah menengah ke bawah. Artinya, mayoritas masyarakat Kelurahan Lubang Buaya belum memiliki kemampuan untuk mencukupi segala kebutuhannya dengan baik yang berarti sebagian besar penduduknya belum hidup dengan sejahtera. Dari permasalahan tersebut, selaras dengan penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Peran PKK dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang, kader PKK dihadirkan untuk bekerja sama dalam merealisasikan kestabilan sosial dan ekonomi masyarakatnya secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia.

Perlu diketahui sebelumnya, jika sekelompok individu di suatu wilayah yang terbentuk dengan tujuan untuk melakukan pemberdayaan guna meningkatkan kesejateraan keluarga disebut sebagai kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), sedangkan segala bentuk kegiatan yang dilakukan kader PKK dalam meningkatkan pendapatan keluarga disebut dengan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Sehingga dalam pemberdayaan pelaku UMKM, kelompok yang terkait disebut juga sebagai kader UP2K-PKK.

Selanjutnya, mengenai kestabilan ekonomi, banyak hal atau usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memiliki pendapatan yang cukup dan stabil. Salah satu usaha tersebut adalah dengan membuka usaha berskala kecil yang dapat dikelola oleh keluarga yang dikenal juga dengan sebutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Membuka usaha UMKM sangat memungkinkan pada Kelurahan Lubang Buaya yang mana sebagian masyarakatnya memiliki kemampuan baik di bidang kuliner maupun di bidang kerajinan. Sebagian besar masyarakat Kelurahan Lubang Buaya juga telah mengambil aksi ini sebagai solusi untuk meningkatkan pendapatannya sebagai pelaku UMKM. Akan tetapi, tentu dalam mengelola usahanya akan ada kesulitan maupun hambatan yang dihadapi oleh pelaku ketika membuka UMKM akibat keterbatasan dana, pengetahuan, dan pengalaman. Jika kesulitan dan hambatan yang dirasakan

oleh pelaku tersebut tidak segera diatasi, maka hal ini dapat menjadi rantai masalah yang tidak berujung.

Kemudian, saat ini keterlibatan UMKM sendiri juga menjadi salah satu faktor terbesar pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM juga telah dilindungi dan menjadi prioritas negara. Hal tersebut didukung dengan isi dari PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Bagian Keempat Prioritas, Intensitas, dan Jangka Waktu pasal 6 yang menyatakan bahwa:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui: (a) pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (b) pencadangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui pembatasan bagi Usaha Besar; (c) kemudahan perizinan; (d) penyediaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau fasilitasi teknologi dan informasi.[2]

Alasan lain mengapa UMKM menjadi salah satu faktor terbesar pertumbuhaan ekonomi negara karena UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Jumlah penyerapan tersebut menjadikan UMKM memiliki peranan besar dalam menekan angka pengangguran di Indonesia. Namun, disamping dari dampak positif tersebut, pelaku UMKM juga memiliki permasalahan dalam menjalankan usahanya. Alasan tersebut kemudian menjadikan pelaku UMKM sebagai komunitas yang menarik perhatian agar diberdayakan.

Pemberdayaan yang dimaksud pada penelitian ini bukanlah sekedar memberikan bantuan yang semata-mata hanya dengan menggalang dana dan memberikan uang, melainkan berupa pengembangan *hard skill* dan *soft skill* dimana kemampuan tersebut dapat diterapkan oleh pelaku di sepanjang hidupnya. Adapun upaya baik dari lembaga pemerintahan maupun swasta untuk memajukan UMKM adalah dengan mengadakan program pelatihan pengembangan kompetensi pelaku UMKM yang melibatkan kader UP2K-

[2] Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. SIGn Jurnal Hukum, 2(2), 104-121.

PKK. Maka dari itu, adanya UP2K-PKK yang hadir di tengah-tengah masyarakat memilki peran selain sebagai fasilitator, juga sebagai penggerak masyarakat untuk memaksimalkan upaya dari pemerintah serta menjembatani program pemberdayaan dari pemerintah kepada pelaku UMKM.

Melihat adanya keberadaan kader UP2K-PKK dan pelaku UMKM di Kelurahan Lubang Buaya dan kasus pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan dana, pengetahuan, dan pengalaman dalam mengelola usahanya mendorong peneliti untuk menelaah lebih lanjut sehubungan dengan bagaimana para kader menjalankan perannya sebagai fasilitator dan penggerak masyarakat dalam memberdayakan pelaku UMKM dengan judul penelitian "Peran Kader PKK dalam Membangun Keberdayaan Pelaku UMKM di Kelurahan Lubang Buaya".

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang diangkat untuk membatasi pembahasan pada penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja upaya pemberdayaan terhadap pelaku UMKM yang dilakukan oleh kader PKK Kelurahan Lubang Buaya?
2. Bagaimana dampak dari pemberdayaan pelaku UMKM yang dilakukan oleh kader PKK Kelurahan Lubang Buaya?
3. Apa saja hambatan dan solusi yang dilakukan oleh kader PKK pada proses pemberdayaan pelaku UMKM Kelurahan Lubang Buaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pemberdayaan terhadap pelaku UMKM yang dilakukan oleh kader PKK Kelurahan Lubang Buaya.
2. Untuk mengetahui dampak dari pemberdayaan pelaku UMKM yang dilakukan oleh kader PKK Kelurahan Lubang Buaya.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dilakukan oleh kader PKK pada proses pemberdayaan pelaku UMKM Kelurahan Lubang Buaya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan mengenai peran kader PKK dalam membangun keberdayaan pelaku UMKM di Kelurahan Lubang Buaya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi diri pribadi dapat memberikan pengetahuan lebih mengenai peran kader PKK dalam membangun keberdayaan pelaku UMKM di Kelurahan Lubang Buaya.

b. Bagi masyarakat dapat memberikan pemahaman berkaitan dengan peran kader PKK dalam membangun keberdayaan pelaku UMKM di Kelurahan Lubang Buaya.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Mencerdaskan dan Memartabatkan Bangsa